

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* PENDAPAT *ŞHAMS AD-DĪN AS-SARAKĤSI* DALAM KITAB *AL-MABSUṬ* TENTANG IMPLIKASI  
HUKUM CERAI *QABLA AL-DUKĤŪL***

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Aminatus Sholeha**  
**C91215040**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

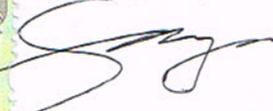
Nama : Aminatus Sholeha  
NIM : C91215040  
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum keluarga  
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam Kitab *al-Mabsūṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



  
Aminatus Sholeha  
NIM. C91215040

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aminatus Sholeha NIM. C91215040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2019

Pembimbing



Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

NIP.197904162006042002

## PENGESAHAN

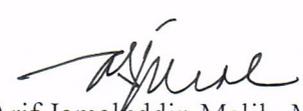
Skripsi yang ditulis oleh Aminatus Sholcha NIM. C91215040 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

  
Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP.197904162006042002

Penguji II,

  
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

  
Dr. Ita Musarrufa, M.Ag  
NIP. 197908012011012003

Penguji VI,

  
Moh. Faizur Rohman, MHI  
NIP. 201603310

Surabaya, 16 April 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan

  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aminatus Sholeha  
NIM : C91215040  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : aminatus.sholeha75@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

***ANALISIS MASLAHAHPENDAPAT SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSI DALAM  
KITAB AL- MABSŪT TENTANG IMPLIKASI HUKUM CERAI QABLA AL-DUKHŪL***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2019

Penulis

Aminatus Sholeha



















Dalam hal rujuk, suami diperbolehkan meminta istrinya untuk kembali tanpa persetujuannya selama istri masih dalam masa *'iddah*. *'Iddah* menurut jumhur ulama adalah masa menunggu seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, untuk menunjukkan rasa sedih karena meninggalnya suami.<sup>5</sup>

Ketentuan tentang diwajibkannya *'iddah* dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِن أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَّمَنِ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, macam dan lamanya *'iddah* dibagi sebagaimana berikut:<sup>6</sup>

1. *'Iddah* seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid

<sup>5</sup> Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah dalam Hukum Fiqh* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 51.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1996), 277-278.



mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian seorang mukmin dengan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa 'iddah dan perempuan itu bisa langsung menikah dengan lelaki lain.<sup>8</sup> Ibnu Katsir menambahkan bahwa perkara ini sudah menjadi ijma' para ulama, bahwa perempuan yang ditalak sebelum digauli tidak ada 'iddah. Ia bisa pergi lalu menikah dengan laki-laki lain yang diinginkan.<sup>9</sup> Sehingga muncul sebuah permasalahan, apakah hanya dengan ber-*khalwah* dapat berimplikasi pada kewajiban 'iddah bagi wanita yang diceraikan *qabla al-dukhūl*.

Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban 'iddah hanya bagi wanita yang ditalak *ba'da al-dukhūl* sedangkan bersunyi (*khalwah*) belum mempunyai akibat hukum 'iddah.<sup>10</sup> Alasan pendapat ini karena tujuan dari 'iddah adalah membersihkan rahim (*bara'at ar-rahmi*), sedangkan *khalwah* atau bersunyi belum tentu termasuk dalam kriteria *al-dukhūl*.

Para ulama madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan belum melakukan *khalwah*, tidak mempunyai kewajiban

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid 8 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 23.

<sup>9</sup> Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2013), 435.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad (Jakarta: Basric Press, 1994), 191.







1. Skripsi Idhatun Nashihah (mahasiswa Ahwalus Syahsiyah UIN Walisongo Semarang) tahun 2017 berjudul “*Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab al Mabsuth tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang*” bertujuan untuk mengetahui alasan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang kebolehan ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang dalam kitab *al-Mabsūṭ*.<sup>13</sup> Kesamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* namun memiliki perbedaan dalam objek pembahasan. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang kebolehan ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang, adapun penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*.
2. Skripsi Amal (mahasiswa Ahwalus Syahsiyah UIN Walisongo Semarang) tahun 2016 berjudul “*Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut’ah Kepada Istri yang Dicerai Qabla al-dukhūl*” bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan *istinbat* hukum Imam Hanafi tentang membayar *mut’ah* kepada istri yang dicerai *qabla al-dukhūl*.<sup>14</sup> Ulama berbeda pendapat mengenai membayar *mut’ah* kepada istri yang dicerai *qabla al-dukhūl*. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama

---

<sup>13</sup> Idhatun Nashihah, “Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab al Mabsuth tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang” (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2017).

<sup>14</sup> Amal, “Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut’ah Kepada Istri yang Dicerai Qabla Al-Dukhūl” (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2016).

membahas pendapat Imam Hanafi. Namun perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas tentang membayar *mut'ah* wanita yang dicerai *qabla al-dukhūl*, sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah tentang ketentuan *'iddah* istri yang bercerai *qabla al-dukhūl* sedang ia dengan suaminya sudah *khalwah* setelah menikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Ahwalus Syahsiyah Syariah UIN Walisongo Semarang, Muhamad Afifudin pada tahun 2014 dengan judul "*Studi Analisis terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang Cerai Qabla al-dukhūl*". Penulis menjelaskan tentang relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam dengan fikih mengenai ketentuan bahwa cerai *qabla al-dukhūl* tidak wajib *'iddah*.<sup>15</sup> Persamaan dengan skripsi yang akan peneliti angkat adalah sama-sama membahas tentang cerai *qabla al-dukhūl*. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih fokus dalam mengkomparasi ketentuan dalam KHI Pasal 153 ayat (1 dan 3) dengan ketentuan fikih sedangkan dalam skripsi yang akan dipaparkan, penulis akan menganalisis pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* mengenai implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*.
4. Skripsi Hafid Azwar (mahasiswa Ahwalus Syahsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2010 berjudul "*Pandangan Hakim*

---

<sup>15</sup> Muhamad Afifudin, "Studi Analisis terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang Cerai Qabla al-Dukhūl" (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2014).

*dalam Memberikan ‘Iddah bagi Percerian Nikah Hamil Qabla al-dukhūl: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang’*. Penulis mengemukakan bagaimana pendapat hakim memberikan *‘iddah* istri yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan kemudian diceraikan suami dalam keadaan belum dicampuri.<sup>16</sup> Persamaan dengan skripsi yang akan penulis sampaikan adalah sama-sama membahas tentang *‘iddah* wanita cerai *qabla al-dukhūl*. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang pendapat hakim yang memberikan *‘iddah* bagi istri yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum menikah namun setelah menikah ia belum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan suaminya, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis sampaikan lebih membahas pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang istri yang diceraikan *qabla al-dukhūl* namun sudah ber-*khalwah*.

5. Skripsi Rika N. Fajrina (mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo) pada tahun 2010 berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut’ah Kepada Istri Qabla al-dukhūl : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus*”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai dasar hukum hakim mengabulkan gugat rekonsensi istri yang meminta nafkah *mut’ah* dan

---

<sup>16</sup> Hafid Azwar, “Pandangan Hakim Dalam Memberikan ‘iddah bagi Percerian Nikah Hamil Qabla al-Dukhūl: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Skripsi-- UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

nafkah *'iddah* karena diceraikan oleh suaminya sedang ia *qabla al-dukḥūl*.<sup>17</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang istri yang bercerai *qabla al-dukḥūl* namun perbedaannya dalam skripsi ini membahas tentang nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sedangkan skripsi yang akan penulis sampaikan hanya membahas ketentuan *'iddah* istri cerai *qabla al-dukḥūl*.

Telah jelas bahwa belum pernah ada penelitian yang sama sehingga penulis dapat melanjutkan penelitian yang berjudul: “*Analisis Maṣlaḥah Pendapat Shams ad-Dīn as-Sarakhsī dalam Kitab al-Mabsūṭ tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla al-Dukḥūl*”.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan maka penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukḥūl*
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukḥūl*

---

<sup>17</sup> Rika N. Fajrina, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut’ah Kepada Istri Qabla al-dukḥūl: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus” (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2010).







- a. Sumber primer ialah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian (*obyek research*) atau data yang erat kaitannya dengan variabel pokok.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa kitab *al-Mabsūt* jilid 5 dan jilid 6 karangan *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*.
- b. Sumber sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dari data primer.<sup>22</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa buku dan kitab-kitab hanafiyah dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan judul di atas. Sumber data sekunder diantaranya adalah:
- 1) *Muhammad Jawad al-Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzhahib al-Khamsah*
  - 2) *As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah*
  - 3) *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
  - 4) Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>23</sup> Baiknya suatu teknik pengumpulan data dapat berpengaruh pada baik tidaknya

---

<sup>21</sup> Taliziduhu Ndraha, *Research Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Melton Putra, 1985), 60.

<sup>22</sup> Ibid.,60.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 138.

sebuah penelitian, sehingga dalam proses ini harus dilakukan dengan baik dan sistematis.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Budd, analisis isi (*content analysis*) merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah isi pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam kitab *al-Mabsūṭ* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*.

#### 5. Teknis Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data dan untuk mempermudah proses analisis maka peneliti perlu mengolah data yang diperoleh terlebih dahulu untuk mengklasifikasikan dan mengelompokan data. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,

---

<sup>24</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 232-233.











Islam hanya memberi hak talak kepada suami, karena laki-laki menurut kadar akal tabiatnya bersifat lebih sabar dibanding perempuan. Bukti kebenaran alasan tersebut adalah kejadian-kejadian di dunia Barat.<sup>3</sup> Mereka memberi hak talak kepada perempuan, sama halnya laki-laki. Maka akibatnya banyak terjadi talak diantara mereka.<sup>4</sup> Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi terjadinya talak, diantaranya:<sup>5</sup>

- (1) Suami yang mengucapkan talak harus dewasa, berakal sehat, tidak terpaksa, dan sengaja
- (2) Yang ditalak adalah istri atau mantan istri yang masih dalam masa *'iddah* (menunggu)
- (3) Lafadz yang diucapkan menunjukkan putusannya hubungan pernikahan, baik dilakukan secara terang-terangan (*ṣāriḥ*) maupun dilakukan melalui sindiran (*kināyah*) dengan syarat harus disertai niat talak
- (4) Untuk kepastian hukum, talak harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagaimana firman Allah swt dalam Surat *al-Ṭalāq* ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

<sup>3</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 25.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 17.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzhab al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad (Jakarta: Basric Press, 1994), 44-442.





b. *Khulu'*

Dalam Islam mengakui adanya hak cerai di tangan istri (*khulu'*). Islam memperbolehkan *khulu'*, hal ini didasarkan pada ketetapan Allah dalam surat al- Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.<sup>10</sup> Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

c. *Fasakh*

*Fasakh* artinya putus atau batal.<sup>11</sup> *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal lain yang datang kemudian membatalkan perkawinan. Selain itu *fasakh* dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:<sup>12</sup>

- 1) Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- 2) Karena gila
- 3) Karena penyakit kusta
- 4) Karena ada penyakit menular

<sup>10</sup> Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*

<sup>11</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 198-200.

5) Karena *'unnah* (zakar laki-laki impoten)

d. *Li'ān*

*Li'ān* dalam arti bahasa adalah saling melaknat. Sedangkan dalam arti istilah adalah sumpah suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina sedangkan ia tidak bisa mendatangkan empat saksi sehingga istri menolak tuduhannya dengan sumpah pula.<sup>13</sup> Di Indonesia telah ditetapkan beberapa tata cara *li'ān* yaitu dalam Pasal 127 KHI.

Dalam hukum Islam seseorang yang menuduh berbuat zina apabila tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka ia akan dihukum *qadaf*. Namun apabila suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia harus bersumpah atas nama Allah Swt. dengan menyatakan bahwa istrinya benar-benar melakukan zina dengan orang lain sebanyak empat kali dan laknat Allah akan menyimpannya jika ia berdusta. Selanjutnya, jika istri menolak tuduhan tersebut maka istri harus bersumpah atas nama Allah Swt. menyebut sebanyak empat kali bahwa yang dikatakan suaminya adalah dusta. Jika istri mengakui tuduhan tersebut, ia akan dikenai hukuman 100 kali dera karena berbuat zina apabila ia belum pernah melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan apabila sudah melakukan hubungan seksual dengan suaminya maka hukumannya adalah rajam.

---

<sup>13</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

Sebagaimana yang telah disebut dalam surat al-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾  
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ  
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“6. dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>14</sup>8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. 9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

e. *Zihār*

Kata *zihār* secara bahasa berarti punggung. Menurut istilah fiqih, *zihār* adalah ungkapan suami kepada istrinya “bagiku, kamu seperti punggung ibuku”.<sup>15</sup> *Zihār* ini merupakan tradisi kaum jahiliyah yang dibenci oleh Islam. Ungkapan tersebut termasuk talak karena seorang suami telah menyamakan istrinya dengan ibu yang termasuk mahramnya dan haram dinikahi, akibatnya suami haram menyutubuhi istrinya.

Ulama madzhab sepakat bahwa, jika seorang suami telah mengatakan

<sup>14</sup> Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *Li'an*.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab...*, 494.

ucapan tersebut kepada istrinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia membayar denda atau kafarat.<sup>16</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat al-Mujadalah ayat 2-4:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هِيَ أُمَّهَاتُهُمْ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

“orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”

f. ‘*Ilā*’

Secara syariat ‘*ilā*’ adalah sumpah suami dengan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya

<sup>16</sup> Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab* ( Jakarta: Lentera, 2007), 207.









perkumpulan yaitu antara dua alat kelamin baik pria maupun wanita.<sup>25</sup>

Yang menjadi landasan hukum hubungan suami istri (*al-dukhūl*) adalah firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اِنَّى شِعْمٌ وَقَدِمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلْكُوْهُ  
وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Jadi apabila dihubungkan, kata *qabla* dan kata *al-dukhūl* dapat dipahami bahwa *qabla al-dukhūl* merupakan keadaan dalam ikatan perkawinan suami istri yang belum melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*).

Munculnya implikasi hukum berpengaruh dengan konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*), seperti mandi *janābah*, membayar *mut'ah*, ataupun 'iddah namun tidak harus mencapai arti sesungguhnya atau bahkan sampai sempurna. Seperti ketika seseorang melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*), yakni tenggelamnya kepala penis (*khashafah*) ke dalam vagina (*farji*), meskipun belum ejakulasi (*inzāl*) baik melalui jalan belakang atau jalan depan, dari seorang laki-laki atau perempuan, terpaksa atau rela, orang yang tidur atau tersadar.<sup>26</sup> Tenggelamnya kepala penis atau sebagiannya ke

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 622.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Fikih Islam*, Juz I, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 444.





minim, atau tidak ber-akhlak mulia. Allah memberi jalan keluar untuknya dengan talak,<sup>32</sup> sebagaimana firman Allah dalam QS. An- Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya perceraian serta hikmah dibolehkannya suatu perceraian terjadi, ialah:<sup>33</sup>

- a. Kemandulan, apabila suami mengalami kemandulan maka ia tidak mempunyai keturunan. Karena keturunan merupakan salah satu tujuan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu dalam hal ini perceraian diperbolehkan. Disinilah hikmah perceraian bagi pihak yang ingin memiliki keturunan.
- b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan serta segala hal yang mengingkari cinta dan kasih sayang. Ketika terjadi sebuah pertengkaran dalam rumah tangga apabila sebuah hubungan tetap dipaksakan dapat menyebabkan terjadinya macam-macam bahaya sehingga perceraian dimaksud agar dapat memberi jalan.

---

<sup>32</sup> Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-fatwa tentang Wanita*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016),614.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 14.









maka tidak akan merusak suatu kehidupan seseorang, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan seseorang.

### 3) *Maṣlaḥah Tahsiniyah*

Merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keluasan yang dapat membantu atau melengkapi kemaslahatan sebelumnya serta sesuatu yang dapat mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.

b. Dari segi pengakuan *syari'* atasnya, *al-maṣlaḥah* dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam:<sup>42</sup>

#### 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Merupakan *maṣlaḥah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' yang ditunjukkan oleh dalil (*nas*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa jenis *maṣlaḥah* ini merupakan *ḥujjah syar'iyah* yang valid dan otentik.<sup>43</sup> Sebagai contoh *maṣlaḥah* ini yang merupakan manifestasi organik dari aplikasi *qiyas* adalah di dalam alquran telah dijelaskan larangan menyetubuhi istri yang sedang haid karena adanya faktor penyakit yang akan timbul. Alasan tersebut sudah sesuai dengan landasan *maṣlaḥah* yakni mendatangkan kebaikan dan menghindari

---

<sup>42</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh : Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 195.

<sup>43</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 129.





### BAB III

## IMPLIKASI HUKUM CERAI *QABLA AL-DUKHŪL* DALAM KITAB *AL-MABSŪT* KARANGAN *SHAMS AD-DĪN AS-SARAKHSĪ*

### A. Biografi *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*

#### 1. Riwayat Hidup

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl merupakan ahli fikih dalam madzhab Hanafi. Beliau dilahirkan di Sarakhs, sebuah kota tua di daerah Khurasan.<sup>1</sup> Sekalipun as-Sarakhsi tergolong ulama besar, namun riwayat hidupnya tidak ditemukan secara lengkap. Tahun kelahirannya tidak tercatat.

*Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dikenal sebagai *Syams al A'immah* (matahari para Imam). Karena penguasaan ilmu yang baik, gurunya memberi nama Imam as-Sarakhsi.<sup>2</sup> Sebagai seorang ulama beliau terkenal sebagai intelektual dan orang yang teguh pendirian. Dalam konteks ini, beliau sering berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama. Namun beliau sangat berani mengatakan yang dinilainya benar sekalipun berakibat buruk pada dirinya. Sebagai bukti keberaniannya, beliau pernah dikurung dalam penjara dengan waktu yang cukup lama

<sup>1</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LPKSM, 2001), 161.

<sup>2</sup>Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Tarjamah al- Mu'allif al-Mabsūt*, Juz 31 (Beirut Libanon: Dārul al-Ma'rifat, 1993), 7.





perintah dan larangan merupakan hal utama dalam kajian ushul fikih.<sup>7</sup>

Dalam referensi pemikiran hukum Islam, *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan, baik ketika berhadapan dengan tokoh yang berseberangan dengan madzhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan madzhab maupun di luar madzhab.<sup>8</sup>

Ada beberapa versi tahun wafatnya: menurut Abu al-Wafa' al-Afghani, pen-tahqiq buku *Uṣul as-Sarakhsī*, *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* wafat tahun 483 H/1090 M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab *al-Jawahir al-Mudi'ah fi Ṭabaqat al-Hanafīyyah* (sebuah buku biografi ulama mazhab Hanafi), *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* wafat pada akhir tahun 490 H/1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., 1609.

<sup>8</sup> <https://www.hujjah.net/al-mabsuth/> diakses pada rabu, 03-06-2019. Pukul 21:58.

<sup>9</sup> Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum ...*, 169.

## 2. Guru dan Muridnya

Pada masa remaja beliau belajar dengan *Abdul al-Aziz al-Halwani*. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi yang didirikan oleh *Imam Muhammad al-Syaibani* sampai ia menjadi tokoh terkemuka dalam madzhab Hanafi. Beliau bukan hanya ahli dalam ilmu fiqh namun juga ahli dalam ilmu kalam dan hadis.<sup>10</sup>

Beberapa murid beliau adalah *Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi*, *Abu Amr Usman bin Ali* dan *Abu Hafs Umar bin Hubaib*, kakek pengarang kitab *al-Hidayah* dari keturunan ibunya, *Abdul Aziz bin Umar bin Mazah*, *Mahmud bin Abdul Azis*, dan *Mas'ud bin al-Hasan*.<sup>11</sup>

Kamal Pasya, salah satu mujtahid yang memicu kecerdasannya. Beliau menyatakan bahwa *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* merupakan mujtahid dari madzhab Hanafi dan merupakan ulama besar pada zamannya.<sup>12</sup>

## 3. Pemikiran *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*

*Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* memiliki beberapa pemikiran mengenai fikih dan ushul fikih. Beliau sebagai *mujtahid fī al-masā'il* (mujtahid beberapa persoalan atau permasalahan fikih) beranggapan bahwa

---

<sup>10</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh ...*, 162.

<sup>11</sup> Shams ad-Dīn as-Sarakhsī, *Tarjamah al-Mu'allif ...*, 7.

<sup>12</sup> Ibid., 7.



baik jika menurut *syara'* baik, karena penilaian baik bukan berdasarkan akal semata-mata.

B. Konsep *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl*

Sebuah peristiwa putusnya perkawinan memiliki implikasi hukum atau akibat hukum setelahnya. Seperti status, '*iddah*, *mut'ah*, nafkah '*iddah*, *hadhanah*, pembagian harta bersama sampai pada kewarisan apabila putusnya perkawinan diakibatkan salah satu pihak meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi *qabla al-dukhūl* atau *ba'da al-dukhūl*, keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria *al-dukhūl*.

*Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* berpendapat wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dan sudah bersunyi (*khalwah*) dengan suaminya mewajibkan istri untuk menjalani masa '*iddah*. Alasan ulama yang berpendapat bahwa bersunyian (*khalwah*) dalam pernikahan yang sah mewajibkan '*iddah* adalah karena hal tersebut memungkinkan tercapainya manfaat, sehingga menyebabkan kewajiban '*iddah* sebagaimana tetapnya upah dalam hal memperoleh manfaat dalam akad sewa-menyewa.<sup>14</sup> *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* menjelaskan dalam kitab *al-Mabsūṭ* sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Abū 'Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz III (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 118.



### C. Pandangan Ulama terhadap Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī*

Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan secara rinci tentang hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan *'iddah*. Begitu pula mengenai bagaimana hubungan suami istri yang dapat dikategorikan mempunyai implikasi hukum. Penulis mengumpulkan beberapa pendapat para ulama tentang hal serupa sebagaimana pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang cerai *qabla al-dukhūl*.

Ibnu Qudamah membela pendapat ini bahwa hal tersebut merupakan ijma' para ulama.<sup>18</sup> Beliau menuliskan dalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut:

وَلَنَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - ﷺ -، رُوِيَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: فَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمُهَدِّيُونَ، أَنَّ مَنْ أَعْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْحَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجِبَتْ الْعِدَّةُ

“Dalam mazhab kami: hal ini merupakan ijma' para sahabat radiyallahu'anhum yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaroroh bin Aufa. Beliau berkata : Khulafaur Rasyidin telah menetapkan bahwa jika seorang suami menutup pintu, atau menutup tirai jendela maka ia berhak mendapatkan mahar dan wajib melakukan *'iddah*”<sup>19</sup>

Namun Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban *'iddah* hanya bagi wanita yang ditalak *ba'da ad-dukhūl*, sedangkan bersunyi

<sup>18</sup>Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan *al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Ta'siri al-Islamy* (Jakarta: Amzah), 322.

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 11 (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997), 198.



## BAB IV

### ANALISIS *MAŞLAĦAH* PENDAPAT *ŞHAMS AD-DĪN AS-SARAKĦSĪ* DALAM KITAB *AL-MABSŪṬ* TENTANG IMPLIKASI HUKUM CERAI *QABLA AL-DUKĦŪL*

#### A. Analisis Pendapat *Şhams ad-DĪn as-SarakĦsĪ* dalam Kitab *Al-MabsŪṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-DukĦŪl*

*al-DukĦŪl* menurut bahasa adalah masuk, namun jika dihubungkan dengan istilah Hukum Keluarga (Ahwal asy-Syahsiyah) kata *al-dukĦŪl* sering diartikan dengan hubungan badan antara suami istri dengan kata lain jimak. Menurut salah seorang ulama fikih Madzhab Syafi'i mengungkapkan dalam kitabnya *Kifāyatul al-Akhyār*, jimak adalah hubungan seksual yang ditandai dengan masuknya ujung *zakar* (alat kelamin laki-laki) ke dalam lubang (vagina) *fāraj* (alat kelamin wanita).<sup>1</sup> Jimak berarti lubang kemaluan wanita dimasuki alat kelamin pria dewasa atau anak kecil atau wanita berhubungan seksual dengan binatang.<sup>2</sup>

Jika dihubungkan dengan perceraian, istilah *al-dukĦŪl* akan berkaitan dengan kewajiban *'iddah*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenal istilah *al-dukĦŪl* yang dijelaskan dalam menentukan masa tunggu atau *'iddah* setelah terjadi peristiwa putusnya perkawinan. Dalam Pasal 153 KHI menjelaskan bahwa wanita yang dicerai suaminya *qabla al-dukĦŪl* maka baginya tidak berlaku masa tunggu. Namun dalam KHI tidak menjelaskan terkait kriteria *al-dukĦŪl*

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 822.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 822.



فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَدِيدِ إِلَى: أَنَّهُ لَا تَأْتِيُرُ لِلْحَلْوَةِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ، وَلَا فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ

“Imam Syafi’i mengemukakan dalam qaul jadidnya: “khalwat tidaklah berpengaruh dalam hal penentuan mahar ataupun masa iddah”

Imam Syafi’i berpendapat demikian karena tujuan *‘iddah* adalah untuk membersihkan rahim, sedangkan *khalwah* tidak memiliki pengaruh dengan keadaan rahim. Sehingga menurut beliau pasangan yang sudah *khalwah* kemudian mereka bercerai maka istri tidak perlu menjalani masa *‘iddah*.

Mengingat beberapa hikmah *‘iddah* diantaranya adalah:<sup>4</sup>

1. Untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri
2. Untuk ibadah
3. Untuk berkabung atas kematian si suami
4. Untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak

Dalam talak *ba’in*, perpisahan akibat rusaknya perkawinan atau persetubuhan maka menjalani masa *‘iddah* dimaksud untuk membersihkan rahim untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari suami agar tidak terjadi percampuran nasab.

Dalam talak *raj’i*, *‘iddah* dimaksud kemungkinan suami untuk kembali kepada istri yang telah dia talak. Setelah kemarahannya hilang dan jiwanya

---

<sup>4</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 533.

kembali tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan dan bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan. Hal-hal diatas merupakan salah satu perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut penulis alasan Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan *'iddah* karena *khalwah* tidak berpengaruh engan keadaan rahim dapat dilemahkan dengan adanya tes USG, karena dengan munculnya kecanggihan zaman yang modern dapat meringankan segala sesuatu seperti untuk mengetahui keadaan rahim wanita. Ultrasonografi sering disingkat USG, atau dalam bahasa inggrisnya *Ultrasound* adalah suatu alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi sangat tinggi.<sup>6</sup>

Jika dihubungkan dengan masa *'iddah*, USG memiliki kelebihan salah satunya dapat mendeteksi keadaan rahim wanita dengan cepat sehingga wanita tidak perlu menunggu lama sebagaimana dia harus menjalani masa *'iddah*, sedangkan dalam hukum Islam mewajibkan *'iddah* selama tiga kali *quru'*, empat bulan sepuluh hari atau jika dipastikan hamil maka *'iddah*-nya sampai ia melahirkan. Sehingga pendapat tersebut dapat menawarkan permasalahan baru yakni tes USG sebagai alternatif *'iddah*.

---

<sup>5</sup> Ibid., 537.

<sup>6</sup> P.E.S. Palmer (ed.), *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*, Penerjemah: Andry Hartono, (Jakarta: EGC, 2001), 3.



Demikian juga alasan beliau adalah karena hal tersebut memungkinkan tercapainya manfaat, sehingga menyebabkan kewajiban *'iddah* sebagaimana tetapnya upah dalam hal memperoleh manfaat dalam akad sewa-menyewa.<sup>8</sup>

Islam mengenal istilah *khalwah*, yaitu berduaan dengan lawan jenis setelah terjadinya akad nikah yang dibenarkan.<sup>9</sup> Kekhawatiran Islam bahwa *khalwah* akan membawa seseorang pada perbuatan zina sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa ketika dalam kondisi *khalwah* sesungguhnya diantara keduanya adalah setan. Oleh karena itu, besar kemungkinan *khalwah* dapat membangkitkan perasaan dan hasrat seksual. Seandainya tidak dapat terpenuhi dengan lawan *khalwah*-nya dorongan libido akan membawanya pada fantasi seksual yang lebih kuat. Dalam konteks seperti ini besar kemungkinan untuk melakukan *istimna'* (maturbasi) yang tujuannya untuk melepaskan hasrat seksualnya.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa terkait masalah *khalwah* perlu mendapat perhatian khusus. Terutama *khalwah* pasangan yang sudah dalam ikatan perkawinan yang sah, karena belum ada *nās* yang mengatur. Sehingga untuk menemukan suatu jawaban hukum atas suatu permasalahan para tabi'in melakukan ijtihad dengan mengikuti cara sebelumnya yang sudah dirintis oleh

---

<sup>8</sup> Abū 'Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz III (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 118.

<sup>9</sup> Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abu Khadijah (Mesir: Daar Al- Kitaab Al- 'Arabi, 1994), 79.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 46-47.



perkawinan tersebut ia dan bekas suaminya belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Demikian analisis penulis terhadap pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* tentang implikasi hukum cerai *qabla al-dukhūl*.

#### **B. Analisis *Maṣlahah* Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam Kitab *Al-Mabsūṭ* tentang Implikasi Hukum Cerai *Qabla al-Dukhūl***

al-Gazali meringkas pengertian *maṣlahah* dengan: “apa-apa yang mendatangkan manfaat atau yang menolak mudharat”. Namun karena keduanya (mendatangkan manfaat atau yang menolak mudharat) merupakan keinginan manusia sedangkan maslahat adalah maksud Allah, sehingga al-Gazali memaknai *maṣlahah* dengan menggunakan rumusan baru yakni: “memelihara tujuan syara’”. Jika dihubungkan dengan keinginan manusia, tujuan *syara’* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>13</sup>

Mengenai perceraian *qabla al-dukhūl* dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 49, di dalamnya terdapat ungkapan *qabla an tamassūhunna*. Jumhur ulama sepakat bahwa ungkapan tersebut berarti *qabla al-dukhūl* dan sepakat bahwa perempuan yang dimaksud ayat tersebut tidak perlu menghitung masa *‘iddah*. Namun persoalan *al-dukhūl* tampaknya tidak mudah menjadi patokan berkenaan dengan ketentuan *‘iddah*. Ulama menggunakan istilah *khalwah* yang mana belum tentu didalamnya terjadi *al-dukhūl*. Apabila *‘iddah* disamping membersihkan

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 232.



dengan menggunakan metode *maṣlaḥah*.

Menurut Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Alasannya agar kemaslahatan dapat didasarkan dengan kehendak *syara'*, bukan didasarkan dengan hawa nafsu. Selanjutnya Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan *syara'* yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, dapat dinamakan *maṣlaḥah* apabila sesuatu tersebut merupakan upaya untuk menghindari kemudharatan kelima aspek tujuan *syara'*.

Pendapat *Shams ad-Dīn as-Sarakhsī* dalam penetapannya tentang kewajiban *'iddah* bagi wanita yang cerai *qabla al-dukhūl* dengan *khalwah* telah memenuhi kategori *maṣlaḥah*.

Pertama, ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan *syara'* yaitu memelihara agama (*hifdz al-dīn*), mengingat tujuan *'iddah* ialah untuk taat kepada Allah (*taabudy*) karena *'iddah* merupakan kewajiban yang disyariatkan oleh Islam, dibuktikan dengan firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)















